BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Humas merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi yang timbal balik atau dua arah yang diharapkan adanya *mutual understanding, mutual confidence* dan *image* yang baik. Ini semua langkah-langkah yang ditempuh humas untuk mencapai hubungan yang harmonis.

Begitu pula dengan Polda Jabar, Bidang Humas menyelenggarakan hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan / informasi serta kerja sama / kemitraan dengan media. Hubungan tersebut dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas polri.

Polda Jabar yang berkewajiban melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat selaku aparat hukum yang profesional. Diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat agar pesan-pesan (misi dan visi) sampai pada sasaran dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Salah satu hubungan yang dilakukan oleh humas Polda Jabar adalah hubungan internal dan eksternal. Kegiatan humas Polda Jabar selalu berupaya menciptakan suasana yang harmonis serta menciptakan opini yang positif, agar dapat dinilai baik oleh pihak dalam maupun luar / masyarakat.

Untuk mengetahui tentang proses kegiatan humas tersebut, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

1.1 Sejarah Perusahaan

1.1.1 Sejaran Lahirnya Polri

Tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari Bhayangkara. Dari Purwokerto pula strategi perjuangan Kepolisian RI direncakan dan diprogramkan untuk mengendalikan dan menggerakkan potensi kepolisian di seluruh wilayah Nusantara.

Polri berdiri di Purwokerto Jawa Tengah. Secara resmi Polri telah lahir tepatnya tanggal 1 Juli 1946, berdasarkan Keputusan Mentri muda Kepolisian RI, dan di tanda tangani oleh Letnan Jenderal Pol. R. Sumarto. Dan jadilah tanggal 1 Juli diperingati oleh seluruh jajaran aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai *Hari Bhayangkara.*

Berdasarkan catatan sejarah, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terbentuk-lah 12 Kementrian Dalam Negeri. Secara resmi Kabinet Pertama ini disyahkan pembentukannya tanggal 4 September 1945. Kementrian Dalam Negeri pada waktu itu membawahi Kepolisian RI, yang waktu itu masih menggunakan nama Jawatan Kepolisian Negara RI, yang dikepalai oleh RS Soekanto Tjokrodiatmadja, dengan wakilnya R.Soemarto.

Sejak berdirinya Jawatan Kepolisian yang terorganisasi cukup baik berkantor pusat di Jakarta, tapi karena situasi di Jakarta saat itu tengah kacau balau akibat teror yang dilancarkan serdadu-serdadu KNIL dan Sinyo-sinyo Belanda. Jawatan Kepolisian terpaksa pindah ke Purwokerto, bersamaan dengan pindahnya kementrian Dalam Negeri dari Jakarta ke Purwokerto. Kepindahan Kementrian

Dalam Negeri ini juga disebabkan adanya kerusakan yang dibuat tentara Sekutu dan NICA Belanda, yang kemudian menguasai daerah Jakarta.

Hal ini pula yang mengakibatkan Pemerintahan Pusat RI yang baru 4 bulan menjalankan pemerintah segera berpindah ke Jogyakarta tanggal 4 Januari 1946 sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai Kota Perjuangan RI.

Dengan berpindahnya KDN (Kementrian Dalam Negeri), yang kemudian disusul oleh Jawatan Kepolisian Negara (JKN) dari Jakarta ke Purwokerto pada bulan Februari 1946 menjadikan Purwokerto sebagai pusat segala kegiatan kepolisian, dengan menempatkan markasnya di kompleks bangunan bekas gedung Asisten Residen Hindia Belanda (Sekarang digunakan untuk pertokoan bekas Makodim 0701/Banyumas). Jawatan Kepolisian ini kemudian mulai membangun dan mengkonsolidasikan organisasinya.

Padahal pada saat itu Purwokerto masih diliputi suasana revolusi fisik (perang kemerdekaan) setelah terjadi gerakan lucutan senjata pasukan Jepang. Disusul pula dengan serangkaian peristiwa pembentukan tentara KNIL di daerah. Gerakan pelucutan senjata pasukan Jepang, disusul pula dengan serangkaian peristiwa pembentukan tentara KNIL di daerah Banyumas, pembentukan BKR, penyusunan TKR Divisi V serta pemberangkatan pasukan TKR ke berbagai front pertempuran di luar daerah Banyumas. Keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan organisasi kepolisian RI sebagai instansi pengendali keamanan dalam negeri.

Dalam keprihatinannya, Jawatan Kepolisian RI mengadakan penataan sistem lingkungan kedinasannya termasuk tentang peraturan dan kebijakan di berbagai bidang seperti pakaian seragam, kepangkatan, bagde, dan lain sebagainya. Bahkan

sejak 1 Juli 1946 jawatan ini lepas dari kementrian Dalam Negeri dan langsung menempatkan diri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Republik Indonesia. Maka pada tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari Bhayangkara. Dari Purwokerto pula strategi perjuangan Kepolisian RI direncakan dan diprogramkan untuk mengendalikan dan menggerakkan potensi kepolisian di seluruh wilayah Nusantara.

Di tengah berkecamuknya, revolusi fisik (Perang Kemerdekaan), Kepolisian RI kian mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sekolah pendidikan kepolisian, seperti di Sukabumi, Mertoyudan, dan Magelang meskipun tidak dapat menjalankan tugas dan kegiatan sepenuhnya karena situasi dan kondisi perang kemerdekaan Jawatan Kepolisian juga ikut menerjunkan anggotanya dalam kancah pertempuran, bersama-sama dengan para pejuang dari berbagai kesatuan dan organisasi lainnya untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara ini.

Termasuk ketika terjadi gencatan senjata (case fire) dalam rangkap persetujuan Renville (Agresi Militer Belanda I) tanggal 21-27 Juli 1947. Saat itu pasukan Belanda telah berhasil menyusup ke daerah pertahanan RI di Karesidenan Banyumas dan Pekalongan. Disusul serangan Belanda dengan pesawat udara ke daerah Purwokerto lewat Sokaraja, dengan melancarkan mortir dan kanonade tanggal 29-31 Juli 1947. Serangan Belanda ini menyebabkan pasukan kepolisian yang tergabung dengan pasukan bersenjata lainnya dibawah komando Mayor Jenderal Gatot Soebroto menyingkir ke Banjarnegara yang masih aman. Sementara itu masih bernama Mobrig juga sudah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda di berbagai daerah lainnya.

Pasukan Mobrig dibentuk oleh Jawatan Kepolisian Negara setelah Agresi Militer Belanda I. Mobrig/Brimob yang merupakan pasukan andalan/tempur seperti polisi istimewa secara resmi didirikan tanggal 14 November 1946 di Purwokerto. Pembentukan kesatuan ini merupakan gagasan/prakarsa dari wakil Kepala Jawatan Kepolisian RI, yaitu R.Soemarto.

Pada bulan Juni 1947 terjadi pergantian Komando Kompi Inspektur Polisi Tk.II RM Bambang Soeprapto, salah seorang tokoh pertempuran 5 hari di Semarang, dipindahkan oleh kesatuannya dari MBK (Markas Besar Kepolisian) Semarang, untuk bergabung dengan MBK Banyumas disertai 30 orang anak buahnya. Tak lama kemudian Inspektur Polisi (IP) I RM Bambang Soeprapto diangkat sebagai Komandan Kompi Mobrig Banyumas menggantikan R.Hardono. Dua minggu kemudian pasukan Mobrig Banyumas mulai terlibat pertempuran di Jantung Kota Purwokerto dan sekitarnya yang telah diduduki pasukan Belanda sejak tanggal 1 Agustus 1947. Pasukan Mobrig Karesidenan Banyumas pada waktu itu terdiri dari berbagai kesatuan pasukan yang terpisah dari induk pasukannya seperti Hisbullah, ALRI Cilacap, Tentara Pelajar Purwokerto dan beberapa anggota jawatan Kepolisian negara ditambah beberapa siswa Sekolah Inspektur Polisi Mertoyudan.

Dalam perkembangan selanjutnya struktur organisasi Mobrig Banyumas mengalami perubahan menjadi 4 seksi dalam satu kompi, dan disusun pula beberapa tenaga staf komando kompi. Meski pakaian mereka belum bisa diseragamkan, tetapi jumlah anggota dan persenjataannya kian meningkat.

Sehingga jika dibandingkan dengan kesatuan TNI/Militer setempat saat itu pasukan Mobrig Banyumas jauh lebih kuat.

Saat terjadi gencatan senjata dalam rangka persetujuan Renvile, pasukan Mobrig Banyumas terpaksa harus hijrah ke Banjarnegara. Kemudian pasukan dikonsolidasikan serta disusun kembali keorganisasiannya. Tetapi komandan kompinya tetap, yakni IP I Bambang Suprapto. Dengan keanggotaan MBK Pekalongan 63 orang, MBB Jawatan Kepolisian 12 orang, mereka bergabung ke dalam Kesatuan Mobrig Banyumas. Sehingga bulan Maret 1948 struktur organisasinya berubah lagi, tetapi komandonya tetap Bambang Soeprapto.

Selanjutnya kesatuan Mobrig Polri ini berkembang sebagai pasukan elit Polri, tetap akronim Mobrig(Mobile Brigade) berubah menjadi Brimob (Brigade Mobile) Polri. Pada tahun 1972 Kesatuan Brimob dilikuidasi menjadi kompi-kompi, karena hampir 24 tahun Kesatuan Polri terjebak pada kesatuan Polri terjebak pada pasukan kecil efektif dan Korps Brimob ikut menjadi terpengaruh pada doktrin yang sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan. Tanggal 5 Oktober 1996 dilakukan pemekaran kembali, dan Korps Brimob kemudian dipimpin oleh seorang Brigadir Jendral. Sebelumnya pemekaran korps ini hanya berkekuatan 47 kompi, setelah pemekaran menjadi 67 kompi (perekonomian 60 personil). Sehingga perlu merekrut lagi lebih kurang 1600 anggota untuk di tempatkan di Aceh, Sulawesi Selatan dan Surakarta.

1.2 Sejarah Divisi Bidang Humas

Bagian Humas yang berkedudukan di bawah Polda merupakan nama baru yang sebelumnya di kenal sebagai Dispen (Dinas Penerangan).

Pada tanggal 1 Januari 2003 secara resmi Dispen berubah menjadi Humas di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Perubahan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara RI dimana, pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002. Dimana Keputusan Presiden tersebut menjadi dasarnya.

Susunan Organisasi Polri sesuai dengan Keputusan Presiden.

Pasal 1 : KNRI (Polri) merupakan Kepolisian Nasional dibawah Presiden langsung.

Pasal 2 : Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan, penmgayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 : Susunan Organisasi

1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan.
2. Organisasi Polri tingkat Pusat disebut Mabes KNRI (Mabes Polri).
3. Organisasi Polri kewilayahan disebut KNRI Daerah (Polda).

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, maka keputusan Kapolri NO. Pol : Kep/07/VII/Tahun 1985. Tanggal 1 Juli Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan pada tingkat kewilayahaan KNRI

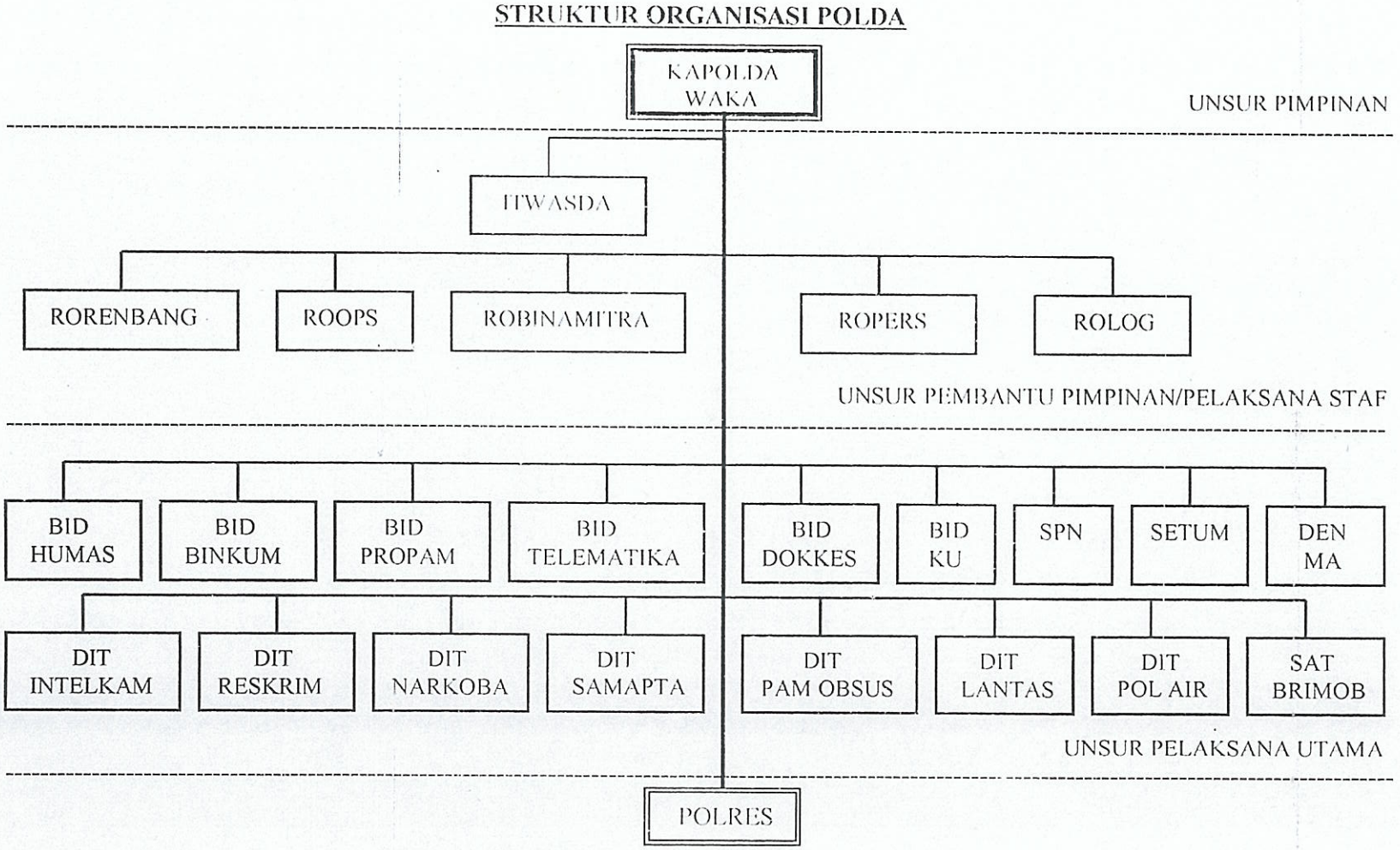
sebagaimana disempurnakan keputusan Kapolri No. Pol. Kep/14/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001 dan keputusan Kapolri No. Pol. Kep/15/V/2001 Tangal 25 Mei 2001 tentang penyempurnaan daftar susunan personil dan perlengkapan badan-badan kewilayahan Polri, dinyatakan tidak berlaku.

Humas dikukuhkan oleh keputusan Kapolri :

1. No. Po. Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes KNRI.
2. No. Pol. Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Daerah (Polda).

Itulah yang menjadi dasar perubahan Dispen Menjadi Humas di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda).

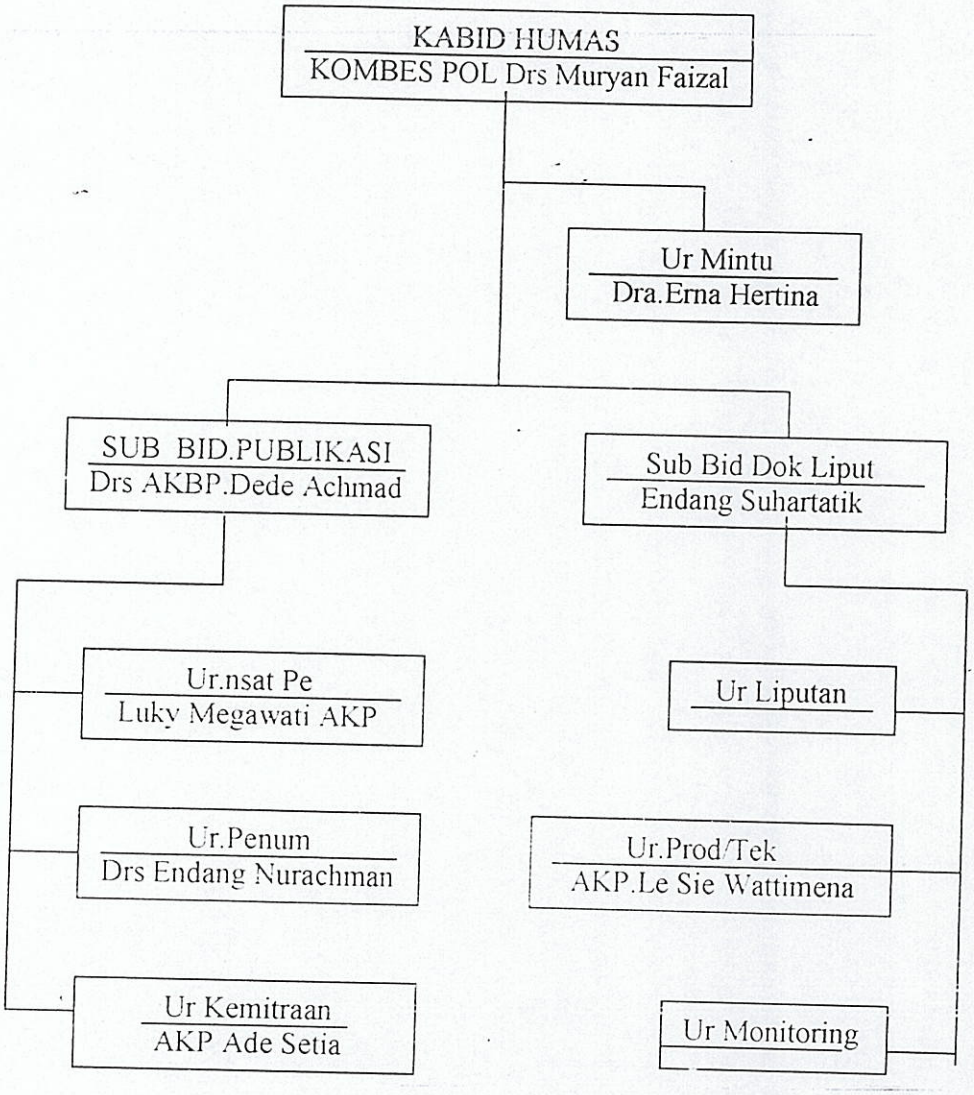
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



1.4 Struktur Divisi Bidang Humas

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG HUMAS

POLDA JAWA BARAT



1.5 *Job Description*

1. Bidang Humas, bertugas untuk :

   a. Menyelenggarakan fungsi Humas dengan melakukan pengelolaan dan penyampaian pemberitaan / informasi.

   b. Melakukan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.

2. Subbid Publikasi, bertugas untuk :

   a. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyampaian informasi baik dilingkungan Polri maupun masyarakat, termasuk kerjasama / kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

   b. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dari urusan Pensat, Urusan Penum, dan Urusan Kemitraan.

   c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabid Humas.

   2.1 Ur Penum, bertugas untuk :

      a. Menyelenggarakan operasional kehumasan kepada masyarakat.

      b. Menyiapkan materi penerangan umum dengan membuat release kegiatan pimpinan untuk disebarluaskan ke Mass media cetak dan media elektronik.

      c. Menyelenggarakan jumpa pers untuk mengekspose kegiatan keberhasilan tugas Polri.

d. Memanfaatkan media massa untuk menyiarkan / memberitakan materi penerangan.

e. Melaksanakan pembetula: dan kontra opini.

f. Mengkoordinasi dengan media elektronik untuk acara kegiatan dialog interaktif, Talk Show dan sebagainya.

g. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat pers.

h. Membuat analisa dan evaluasi terhadap berita dan opini yang berkembang di masyarakat.

i. Meneruskan kliping Koran kepada pimpinan.

2.2 Ur Pensat. bertugas untuk :

a. Menyiapkan materi-materi penerangan pasukan dalam rangka penyelenggaraan penerangan kepada seluruh personil Polri yang bersifat informative, educatif, dan instruktif.

b. Membuat dan mendistribusikan Pensat Polda Jabar serta meneruskan Pensat Divisi Humas Mabes Polri keseluruhan jajaran Polda Jabar.

c. Memantau dan menanggapi opini yang berkembang di internal Polri.

d. Melaksanakan operasi pembentukan dan kontra opini internal Polri.

e. Menyelenggarakan penerangan mobil dan penerangan lapangan bagi internal Polri dalam rangka pemerataan informasi di lingkungan personil Polda Jabar.

f. Mengkoordinir dan mengendalikan produksi majalah Gawisa serta bertanggung jawab dalam pendistribusian ke seluruh anggota.

2.3 Ur Kemitraan

a. Melakukan pembinaan wartawan / pemred dan media massa lainnya.

b. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan humas instansi terkait.

c. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan Bidang Humas.

3. Subbid Dokliput, bertanggung jawab :

a. Menyelenggarakan peliputan, monitoring, produksi, dan dokumentasi semua informasi / pemberitaan yang berkaitan dengan tugas Polri.

b. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dari Urusan Liputan, Urusan Produksi dan tehnik, dan Urusan Monitor.

c. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabid Humas.

3.1 Ur Liputan, bertugas untuk :

a. Menyiapkan film, foto / camera, tape dan kaset VHS serta melaksanakan peliputan kegiatan pimpinan dan kegiatan Polda Jabar guna kepentingan bahan penerangan.

b. Mendokumentasikan foto-foto untuk bahan majalah.

c. Mendokumentasikan hasil-hasil liputan kegiatan pimpinan dan kegiatan di jajaran Polda Jabar.

d. Melaksanakan peliputan semua kegiatan masyarakat yang menonjol.

3.2 Ur Produksi dan Tehnik, bertugas untuk :

a. Mengadakan / menyiapkan sarana dan materi pemeran.

b. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan dalam kaitannya penyiapan bahan penerangan seperti : tustel, camera video, camera TV.

c. Memproduksi semua hasil peliputan maupun hasil monitoring sebagai arsip / dokumen.

d. Melaksanakan bantuan teknis penyidikan dari hasil liputan dan monitoring sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan.

e. Menyelenggarakan dokumentasi dan pengelolaan arsip dokumen peliputan.

3.3 Ur Monitor, bertugas untuk :

a. Memantau berita media, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri.

b. Memonitoring setiap ada Public Complain / keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri

c. Memonitor sampai sejauh mana tanggapan masyarakat ataupun suara kisaran di masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri.

d. Memberikan tanggapan, sanggahan / meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang dianggap tidak benar dan menempatkan pada proporsi yang sebenarnya (Hak Jawab).

4. Ur Mintu, bertugas untuk :

a. Menyelenggarakan urusan administrasi personil, ketatausahaan dalam lingkungan Bidang Humas Polda Jabar.

b. Menyelenggarakan pelayanan yang meliputi urusan administrasi, logistik dan keuangan Bidang Humas Polda Jabar.

c. Pembuatan progiat dan anev progiat.

d. Pembuatan Laporan Bulanan Bidang Humas Polda Jabar.

1.6 Sarana dan Prasarana

NO	MACAM/JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	**Senjata Api**		
	- Genggam	2	Kabid Humas & Kasubid Publikasi
2	**Tanda Kewenangan**		
	- Kewenangan Polri besar	3	Anggota Polri
	- " " kecil	2	S d a
3	**Ranmor Roda 4**		
	1. Truk Panggung (Dyna)	1	Di Markas
	- Sound Sistem	1	S d a
	- Diesel	1	S d a
	2. Daihatsu Feroza	1	K.Publikasi
	3. Toyota Kijang	2	Kabid Humas
	4. Mitsubishi Kuda	1	Markas
4	**Ranmor Roda 2**		
	- Honda GL 100	1	Banum Publikasi
	- Suzuki RC 100	1	Kaur Penum
	- Millenium	1	Banum Publikasi
5	**Peralatan Kantor**		
	- Mesin tik panjang	-	Di staf
	- " " pendek	1	S d a
	- " " IBM	1	S d a
	- " stensil	-	S d a
	- " foto copy-Computer	1	S d a
	- Lemari besar	4	Staf/R. Pers
	- " kecil	5	Staf
	- Rak buku besar	1	S d a
	- Meja tulis besar	3	Kabid & Staf
	- " " kecil	11	Kabid & staf
	- " tamu	12	S d a
	- Kursi besar	2	S d a
	- " tamu	1	Kabid Humas
	- " biasa	2 set	Ksbid&K.Pblks
	- " lipat	20	Kabid & staf
6	**Peralatan Khusus**		
	- Kamera video casette	10	Kaur Liputan
	- " photo	3	S d a
	- Rewinder VHS	9	S d a

	- Televisi 21"	1	S d a
	Televisi 14"	1	S d a
	- " 5,5"	2	Sda
	- Tape recorder	1	Staf
	- Proyektor flm	2	S d a
	- " slide	1	S d a
	- Layar proyektor	1	Staf
	Wareles	1	Staf
7	**Alat komunikasi**		
	- Telepon langsung	1	Kabid Humas
	- Telepon Lokal	3	Kabid Humas
	- H.T	1	Kabid & Staf
	- Faximile	1	Kabid Humas
	- Mega Phone	1	Staf
8	**Lukisan**	2	Kabid Humas

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

Pelaksanaan PKL dilakukan pada Instansi Pemerintah, tepatnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Lokasi : Jl. Soekarno – Hatta No.748 Bandung 40613

Telp : 022 - 7800014

Hari : Senin s d Jum'at

Waktu : 07.00 – 15.00 WIB.

Kegiatan PKL ini dilaksanakan selama kurun waktu satu bulan setengah, mulai dari tanggal 1 Agustus 2003 s/d 13 September 2003.